

BAB II

PERKEMBANGAN PERS DI HINDIA BELANDA

2.1 Perkembangan Pers di Hindia Belanda

2.1.1 Pers Komersial (1744-1854)

Pers merupakan suatu bentuk komunikasi untuk menyampaikan informasi yang dapat menyebarkan pengalaman, pengetahuan, serta menampilkan berbagai peristiwa kehidupan masyarakat yang bersifat nasional maupun internasional. Selain itu, pers juga dapat dijadikan sebagai alat kontrol, inovasi, dan juga sumber kekuatan untuk memperoleh gambaran realita sosial bagi masyarakat dan kelompok²⁶.

Sejarah pers Hindia Belanda memiliki ciri khusus, yaitu terkait dengan kehidupan politik, sosial, dan kebudayaan masyarakat. Hal tersebut menjadi pengaruh yang signifikan dalam perkembangan pers Hindia Belanda sehingga hadir pers baru yaitu pers Belanda yang meliputi surat kabar dan majalah berbahasa Belanda, Indonesia atau berbahasa daerah untuk tujuan membela kaum kolonial Belanda. Pers Melayu-Tionghoa meliputi majalah dan koran berbahasa Cina, Belanda, atau Indonesia yang diterbitkan langsung oleh golongan keturunan Tionghoa²⁷.

Perkembangan sejarah pers di Hindia Belanda berlangsung sejak tahun 1774-1854. Pada periode ini, hanya terdapat surat kabar yang dimiliki dan dikelola oleh orang-orang Eropa, khususnya bangsa Belanda. Karena seluruh

²⁶ Kurniawan Junaedhi, *Ensiklopedia Pers Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1991, hlm. 206.

²⁷ Hamdan Daulay, *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*, Bandung: PT. Remaja Rosdakara, 2016, hlm. 6.

bahasa, isi, serta orientasi pembaca surat kabar tersebut ditujukan hanya untuk kalangan Eropa, sehingga periode ini disebut dengan nama Babak Putih. Istilah tersebut merujuk pada dominasi pers oleh bangsa kolonial, tanpa adanya keterlibatan dari kalangan pribumi, baik sebagai penulis, pengelola, maupun pembaca. Surat kabar pada masa itu hanya ditulis menggunakan bahasa Belanda dan hanya memuat topik mengenai kehidupan orang-orang Eropa di Hindia Belanda²⁸.

Surat kabar pertama di Hindia Belanda yaitu *Bataviase Nouvelles en Politique Raisonnementen*²⁹ terbit pada tanggal 17 Agustus 1744 dan hanya bertahan selama 2 tahun. Surat kabar ini ditutup oleh Gubernur Jenderal G. W. Baron van Imhoof pada Juni 1746³⁰ yang mendapat perintah dari direktur VOC³¹, karena dianggap merugikan kepentingan VOC yang ada di Eropa maupun di Hindia Belanda, surat kabar ini digunakan sebagai media monopoli Belanda³².

Kemudian dengan izin dari pemerintah, pada tahun 1776 sampai tahun 1809, surat kabar mingguan yaitu *Het Vendu-Nieuws* diterbitkan oleh L. Dominikus seorang juru cetak di kota Batavia. Namun, surat kabar tersebut dibeli

²⁸ Pramoedya Ananta Toer, *Bahan Kuliah: Sejarah Modern Indonesia*, Jakarta: Universitas Res Publica, 1964, hlm. 43.

²⁹ Surat kabar yang terdiri dari selembarnya dengan ukuran folio dan halaman keduanya masing-masing berisi dua kolom. Para pembaca bisa mendapatkan surat kabar ini setiap hari Senin dari Jan Abel, yaitu perusahaan penjiwaan milik pemerintah VOC di Benteng. Peredaran surat kabar ini hanya diterbitkan untuk golongan bangsa Eropa dan para pegawai pemerintah VOC. Lihat: Tribuana Said, *Sejarah Pers Pancasila*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988, hlm. 15; Atmakusumah, *Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia*, Jakarta: Grafit Pers, 1983, hlm. 63.

³⁰ Edisi terakhir dari surat kabar ini terbit pada hari Senin, 20 Juni 1746. Lihat: Von Faber, *A Short History of Journalism in the Dutch East Indies*, Surabaya: G. Kolff & Co, 1930, hlm. 18.

³¹ *Vereenigde Oost Indische Compagnie*, perusahaan perserikatan maskapai wilayah Hindia-Timur yang dibentuk pada bulan Maret 1602 sebagai bentuk gabungan perseroan Belanda untuk bersaing dalam menguasai perdagangan rempah-rempah di Hindia Belanda. Lihat: M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001, hlm. 72.

³² Zainal Abidin Achmad, *Perbandingan Sistem Pers dan Sistem Pers di Indonesia*, Surabaya: Penerbit Sahaja, 2021, hlm. 23.

pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels dan mulai menerbitkan surat kabar yang memuat semua tindakan pemerintah dan menyangkut kepentingan umum, serta membuat peraturan ketentuan mengenai sensor dalam surat kabar³³.

Surat kabar mingguan baru yang bernama *Bataviasche Koloniale Courant*³⁴ terbit pada Januari 1810, namun surat kabar ini ditutup ketika armada Inggris berhasil menaklukkan Batavia pada tahun 1811. Kemudian ketika Belanda datang kembali, pemerintah menerbitkan surat kabar berbahasa Belanda bernama *Bataviasche Courant* tahun 1817 untuk bangsa Eropa³⁵. Kualitas surat kabar yang diterbitkan sangat rendah, memuat banyak berita mengenai keputusan dan daftar kepangkatan dari pegawai pemerintah, serta memuat berita mengenai pelelangan.

Surat kabar iklan bernama *Soerabaijasch Advertentieblad* terbit di Surabaya pada tahun 1836, namun surat kabar ini diberikan izin penerbitannya oleh pemerintah pada tahun 1853 dan berganti nama menjadi *Soerabaijasch Nieuws en Advertentieblad*. Pada tahun yang sama terbit *De Oostpots* di Surabaya, namun surat kabar ini hanya bertahan sampai tahun 1865 dan terbit kembali dengan nama *Soerabaijasch Handelsblad* pada tahun 1866³⁶.

Karakter utama pers pada masa ini ditandai dengan adanya monopoli pada bidang penerbitan. Hanya pers yang berada di bawah kendali pemerintah

³³ *Ibid*, hlm. 24.

³⁴ Surat kabar ini dicetak dalam format kuarto lebar oleh *Landsdrukkerij* yaitu perusahaan resmi pemerintah dan diasuh oleh Ross, yaitu pendeta wilayah Batavia sejak tahun 1788. Surat kabar ini juga memuat iklan, seperti iklan kain, sepatu, penjualan tanah dan rumah, pena bulu ayam, bahkan budak belian. Lihat: Von Faber, *op.cit.*, hlm. 21. Dan Edward C. Smith, *Sejarah Pembreidelan Pers di Indonesia*, Jakarta: Grafit Pers, 1988, hlm. 64.

³⁵ Soebagijo, *op.cit.*, hlm. 9.

³⁶ *Ibid*, hlm. 25.

diberikan izin untuk beroperasi secara resmi. Kebijakan tersebut diberlakukan secara ketat sebagai upaya untuk menekan berbagai kontrol sosial yang mungkin akan dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu, dengan tujuan utamanya yaitu untuk mempertahankan stabilitas politik pada sistem pemerintahan kolonial dan untuk melayani kepentingan kelompok Eropa.

Pengawasan pemerintah mengenai pers menjadi penghambat bagi para penerbit untuk dapat mengatasi rintangan yang lainnya. Salah satu undang-undang dibuat oleh Belanda untuk memberikan hukuman berat bagi penerbit yang melakukan penyiaran dengan kata-kata, secara langsung maupun tidak langsung, melalui surat kabar atau gambar, dengan cara terbuka atau sembunyi-sembunyi, mendesak kejatuhan pemerintah Belanda dengan cara mengkritik dan menebar kebencian terhadap pemerintah. Ordonansi³⁷ pengawasan pers telah memberikan kekuasaan mutlak kepada pemerintah menutup penerbitan surat kabar untuk sementara waktu tanpa adanya proses hukum.

2.1.2 Pers Politis (1854-1907)

Periode kedua sejarah pers Hindia Belanda dimulai tahun 1854 dengan diberlakukannya kelonggaran terhadap pers. Karena pada tahun tersebut merupakan tahun kemenangan kaum liberal di Belanda, sehingga pengaruhnya meluas hingga wilayah Hindia Belanda. Kemenangan tersebut membawa dampak pada kebijakan dalam bidang penerbitan dan aktivitas pers. Undang-undang Pers

³⁷ Pada masa penjajahan Belanda, peraturan perundang-undangan di Indonesia dikenal dengan sebutan *Ordonantie* (Ordonansi). Ordonansi merupakan bentuk peraturan yang ditetapkan oleh penguasa era kolonial yang disebut Gubernur Jenderal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Lihat: Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2018, hlm. 16.

mengenai sensor ditiadakan pada tahun 1856, begitu juga kewajiban tanggung jawab dari pencetak surat kabar.

Persuratkabaran pada periode ini diatur oleh *Binnenland Bestuur*³⁸. Kabar berita yang dimuat adalah hal-hal yang ringan dan biasa, seperti kehidupan para raja dan sultan di Jawa, aktivitas pemerintahan yang monoton, berita ekonomi, serta berita kriminal³⁹. Pada periode ini, perkembangan pers di Hindia Belanda mengenai pengelolaan dan kepemilikan media cetak tidak lagi didominasi oleh orang-orang Eropa, melainkan mulai melibatkan kalangan Indo-Eropa serta Tionghoa. Terdapat ciri yang menonjol dari keterlibatan ketiga kalangan tersebut, yaitu dengan menggunakan bahasa Melayu pada sejumlah penerbitannya.

Masyarakat pribumi mulai terlibat dalam dunia pers pada akhir abad ke 19, dan mulai mengambil peran sebagai seorang wartawan maupun tim redaksi. Salah satu penanda berkembangnya pers di Hindia Belanda pada periode ini yaitu munculnya surat kabar di beberapa daerah, mulai dari surat kabar *Bromartani*⁴⁰, *Soerat Chabar Betawie*⁴¹, *Bintang Timoor*⁴², *Tjahaja Sijang*⁴³, dan *Biang Lala*⁴⁴ di

³⁸ *Binnenland Bestuur*, Penguasa/pemerintahan dalam negeri. Lihat: “Kupas Tuntas Khazanah Arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur–Arsip Nasional Republik Indonesia” <https://www.anri.go.id/publikasi/berita/kupas-tuntas-khazanah-arsip-departement-van-binnenlandsch-bestuur>. Diakses pada: 23 Maret 2025.

³⁹ Akhmad Efendi, *op.cit.*, hlm. 11.

⁴⁰ Surat kabar mingguan berbahasa Jawa yang terbit di Surakarta tahun 1855. Pada awal penerbitannya, surat kabar ini mengajak pembaca untuk berlangganan dan memasang iklan, namun penerbitannya sempat terhenti selama beberapa tahun. *Bromartani* kemudian terbit kembali pada tahun 1865 dan berganti nama menjadi *Djoeroemartani*. Atas perintah Pakubuwono IX, nama surat kabar ini dikembalikan lagi menjadi *Bromartani* pada tahun 1871 yang difungsikan sebagai surat kabar keraton yang memuat berita seputar kehidupan keluarga, pengangkatan, serta mutasi pegawai. Lihat: Abdurrachman Surjomihardjo, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002, hlm. 25.

⁴¹ Surat kabar mingguan berhaluan pers Melayu yang terbit di Batavia pada tahun 1858, ditujukan untuk pembaca yang tertarik pada perdagangan, menggunakan perpaduan bahasa Melayu tinggi (bahasa resmi) dan Melayu rendah (bahasa pergaulan) untuk memudahkan pemahaman untuk pembaca dari berbagai kalangan masyarakat di Hindia Belanda. Kekurangan surat kabar ini yaitu tidak tercantum tim redaksinya. Lihat: Mirjam Maters, *Dari Perintah Halus*

Batavia. Meskipun kepemilikan dan kendali masih berada di bawah kendali orang Eropa, masyarakat pribumi tetap berperan aktif dalam proses produksi maupun penyusunan untuk isi surat kabar tersebut.

Namun pada kenyataannya, surat kabar yang terbit pada tahun 1860 sampai 1880 masih banyak menggunakan bahasa Belanda. Walaupun sudah ada surat kabar bahasa Melayu, belum ada satu pun surat kabar yang diterbitkan secara khusus untuk kalangan pribumi, melainkan untuk para pembaca dari Indo-Eropa serta Tionghoa. Barulah memasuki tahun 1870, mulai muncul perubahan dengan diterbitkannya surat kabar berbahasa Jawa yang ditujukan untuk para bangsawan dan pejabat pribumi, terutama kepada pegawai yang bekerja di pemerintahan⁴⁵.

Fungsi surat kabar mengalami pergeseran pada periode kedua dalam sejarah perkembangan pers di Hindia Belanda, pers mulai digunakan sebagai sarana untuk kepentingan politik. Salah satu contohnya dapat dilihat pada surat kabar *Slomporet Melajoe*⁴⁶. Walaupun demikian, surat kabar ini pada hakikatnya merupakan surat kabar yang berorientasi pada kepentingan komersial. Sebagian besar isi

ke Tindakan Keras: Pers Zaman Kolonial Antara Kebebasan dan Pemberangusan (1906-1942), Jakarta: Hasta Mitra, 2003, hlm. 175.

⁴² Surat kabar yang pertama kali terbit di luar Jawa, tepatnya di Kota Padang tahun 1865. Dalam pemberitaannya, surat kabar ini merupakan surat kabar berhaluan netral yang berada di bawah pimpinan Parada Harahap. Lihat: Surjomihardjo, *loc.cit.*,

⁴³ Surat kabar berbahasa Melayu yang terbit di Sulawesi Utara, tepatnya di Minahasa pada tahun 1869. Proses penerbitannya dikelola oleh pihak Belanda, yang difokuskan sebagai surat kabar untuk menyebarluaskan rohani sekaligus berperan sebagai sarana informasi dan media komunikasi yang efektif bagi masyarakat Minahasa. Lihat: *Ibid.* Dan Andreas Harsono, *Agama Saya adalah Jurnalisme*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2010, hlm. 64.

⁴⁴ *Biang Lala* mulai terbit pada tahun 1868 dan berakhir pada tahun 1870. Lihat: Soebagijo Ilham Notodidjojo, *Sejarah Pers di Indonesia*, Jakarta: Dewan Pers, 1977, hlm. 12.

⁴⁵ Pramoeodya Ananta Toer, *op.cit.*, hlm. 51-52.

⁴⁶ Surat kabar berbahasa Melayu yang mulai terbit pada tahun 1877, dan menjadi surat kabar paling sukses pada abad ke 19. Penerbitannya dilakukan oleh perusahaan percetakan G. C. T. Van Dorp & Co dengan jadwal terbit dua kali setiap minggu. Surat kabar ini berperan sebagai salah satu media informasi dan komunikasi pada masa itu, dan berakhir pada tahun 1911. Lihat: Surjomihardjo, *op.cit.*, hlm. 66.

pemberitaannya memuat berbagai informasi yang mendukung tujuan bisnis. Dalam penyajiannya, surat kabar ini menggunakan bahasa Melayu Rendah atau Melayu Pasar⁴⁷.

Pers Hindia Belanda hadir dari tekanan dan penderitaan terhadap rakyat. Walaupun demikian, pers Hindia Belanda tumbuh bersama-sama dengan adanya dorongan ke arah kemerdekaan nasional yang sesungguhnya. Pers Hindia Belanda tertinggal karena persaingan antara pers Cina dan Belanda, kurangnya pendanaan, minimnya kaum pribumi yang bisa membaca dan menulis, serta penderitaan yang didapatkan pada masa penjajahan Belanda. Persuratkabaran Hindia Belanda pada masa penjajahan hanya diterbitkan oleh penerbit Belanda. Namun oplah yang dihasilkan sedikit, karena semua surat kabar yang diterbitkan tidak mampu untuk berlangganan di *Aneta* (Kantor Berita Belanda). Beberapa surat kabar yang diterbitkan merupakan pengolahan kembali dari berita-berita lama surat kabar Eropa.

Kondisi persuratkabaran di Hindia Belanda mulai menghangat pada saat memasuki abad ke 20, tepatnya pada tahun 1903. Berita permasalahan politik serta selisih paham di antara pemerintah dan masyarakat mulai dimuat. Parada Harahap mengatakan bahwa masa menghangatnya surat kabar tersebut karena adanya *Decentralisatie Wetgeving* (aturan yang dipusatkan). Dengan adanya hal itu, kota besar yang berada di kawasan Hindia Belanda menjadi kota yang memiliki sistem pemerintah otonom, sehingga para petinggi pemerintah mendapat

⁴⁷ Miftahul Habib Fachrurozi, *Politik Etis dan Bangkitnya Kesadaran Baru Pers Bumiputra*, Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 16.

jaminan hak *Onschenbaarheid*⁴⁸, berani mengoreksi kebijakan dan mengkritik atasannya⁴⁹.

2.1.3 Pers Kebangkitan Nasional (1907-1942)

Perkembangan pers Hindia Belanda tidak terlepas dari munculnya kapitalisme pada penerbitan. Sebetulnya penerbitan pers Hindia Belanda sudah lama dikenal, namun baru mengalami perubahan dari visi serta orientasinya setelah memasuki abad ke-20. Perkembangan pers nasional berlangsung sejalan dengan pertumbuhan nasionalisme bangsa. Pers nasional tidak hanya membahas dan memberitakan sosial politik dalam negeri saja, tetapi harus memuat pemberitaan perubahan politik luar negeri. Pers nasional bisa dijadikan sebagai acuan untuk perkembangan rasa nasionalisme bangsa. Meskipun pada awalnya sebagian besar pers merupakan pers partai, tetapi di dalam perkembangannya dapat menjadi media yang efektif untuk menyebarkan pemikiran, gagasan, dan ide mengenai nasionalisme bangsa.

Dunia pers Hindia Belanda mulai memanasi ketika diterbitkannya surat kabar pertama yang dikelola oleh kaum pribumi pada tahun 1907 dengan nama *Medan Prijaji*, pemerintah Belanda menjulukinya sebagai *Inheemsche Pers* (Pers Bumiputra). Terbitnya surat kabar ini merupakan masa permulaan kaum pribumi untuk memasuki dunia pers yang memuat berita politik. Surat kabar *Medan Prijaji* dipimpin oleh seorang Nestor Jurnalistik dan pelopor kebebasan pers kaum

⁴⁸ *Onschendbaarheid* adalah kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan. Lihat: RM. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 392.

⁴⁹ Atmadji Sumarkidjo, *Pers Nasional, Pilar Satu-satunya yang Konsisten Anti-Korupsi*, Jurnal Visi Komunikasi, Vol. 12, No. 1, Mei 2013, hlm. 76.

pribumi yaitu R. M. Tirtoadisuryo, ia menyadari bahwa surat kabar merupakan salah satu alat yang sangat penting untuk menyuarakan aspirasi dari masyarakat⁵⁰.

Pada periode ini, pers memiliki peranan yang sangat signifikan dalam mendukung perkembangan gerakan nasionalisme serta semangat kebangsaan. Selain itu, pers juga digunakan sebagai sarana informasi dan alat propaganda untuk mendorong kesadaran politik dari masyarakat. Dengan demikian, mulai bermunculan surat kabar yang dikelola dan diterbitkan oleh kalangan pribumi, menandai adanya keterlibatan aktif pada dinamika dan perkembangan pers nasional⁵¹.

Selain itu, pada abad ke 20 ini pers memiliki karakteristik khusus, yaitu salah satunya ditandai dengan munculnya surat kabar yang menjadi sarana penyebaran ideologi dari para tokoh maupun organisasi tertentu. Contohnya organisasi Muhammadiyah, yang menerbitkan surat kabar *Soeara Mohammadiyah* sebagai media untuk menyampaikan gagasan serta cita-cita dan prinsip perjuangannya. Demikian pula surat kabar *Jong Java* yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi organisasinya, meskipun digunakan sebagai tujuan penyebaran ideologi, surat kabar tersebut juga memuat berita yang sifatnya umum⁵².

Peran penting pers dalam semangat kebangsaan dan kebangkitan nasionalisme tampak jelas melalui kiprah sejumlah tokoh yang berperan sebagai pelaku pers sekaligus sebagai tokoh pergerakan nasional. Contohnya, H. O. S.

⁵⁰ Akhmad Efendi, *op.cit.*, hlm. 12.

⁵¹ Pramoedya Ananta Toer, *Sang Pemula*, Jakarta: Hasta Mitra, 1998, hlm. 41.

⁵² T. Sjahril, *Garis Besar Perkembangan Pers di Indonesia*, Jakarta: Sarikat Penerbit Surat kabar, 1971, hlm. 81.

Tjokroaminoto yang menjabat sebagai pimpinan redaksi surat kabar *Sinar Djawa* dan *Oetoesan Hindia*, Dr. Wahidin Soedirohoesodo yang memimpin surat kabar *Retnodhoemilah*, serta Ki Hajar Dewantara sebagai pemimpin surat kabar *Persatoean Hindia*. Para tokoh tersebut berkontribusi pada dua ranah yang berbeda, namun saling menguatkan. Melalui surat kabar, mereka menyampaikan semangat dan gagasan perjuangan dalam bentuk tulisan. Sementara melalui organisasi massa, mereka menyebarkan ide-ide tersebut secara langsung melalui pidato⁵³.

Perkembangan pers sejak masa penjajahan di Hindia Belanda ternyata telah menggugah cendekiawan untuk dapat memanfaatkan media cetak dan menyerap budaya pers sebagai sarana menggerakkan dan membangkitkan kesadaran bangsa. Pada proses selanjutnya, terjadi pepaduan antara dewan pers dengan masyarakat yang telah terorganisasi dalam kelompok belajar, badan kebudayaan, lembaga sosial, serta gerakan politik.

2.2 Perkembangan Pers Indonesia Masa Pendudukan Jepang

Media massa berperan sangat penting dalam dunia pers Indonesia hingga saat ini, salah satunya untuk media informasi yang dapat membangun karakter pada masyarakat. Media massa memiliki peran yang sangat besar dalam menguatkan dan membangkitkan semangat juang masyarakat Indonesia, baik ketika meraih kemerdekaan hingga mempertahankan kemerdekaan. Dengan

⁵³ Departemen Penerangan, *Surat Kabar Indonesia pada Tiga Zaman*, Jakarta: Proyek Pusat Publikasi Pemerintah, Departemen Penerangan, 1978, hlm. 55.

adanya penyampaian informasi melalui media massa, pesan kemerdekaan lebih luas tersampaikan kepada masyarakat⁵⁴.

Dunia politik di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan, sehingga pers sangat dibutuhkan oleh pemerintah Jepang. Selain digunakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan Jepang, pers juga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan sistem politik yang ada di Indonesia. Pemerintah Jepang menerapkan pengawasan ketat terhadap seluruh media pers Indonesia. Setiap bahan cetakan, termasuk tulisan maupun berita, harus melalui filterisasi berita oleh petugas sensor. Sebelum surat kabar dicetak, sensor awal dilakukan oleh petugas resmi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kedua oleh petugas *Domei* (Kantor Berita Jepang). Proses ini diakhiri dengan pemberian paraf sebagai tanda persetujuan, yang memperoleh syarat wajib memiliki perizinan.

Semenjak pendudukan Jepang di Indonesia, keadaan pers Indonesia semakin memburuk. Pihak Jepang mulai menutup sebagian penerbitan pers secara berkala dan mulai menjalankan pengawasan ketat terhadap politik serta redaksi surat kabar yang telah diberikan izin untuk terus melakukan penerbitan dengan nama yang baru. Di bawah kekuasaan pemerintah Jepang, pers dilarang memuat propaganda jenis apapun selain muatan propaganda untuk mendukung Jepang⁵⁵.

Masa pendudukan Jepang di Indonesia ternyata membawa dampak positif. Salah satu dampaknya adalah pelarangan penggunaan bahasa Belanda dan

⁵⁴ Ignstius Haryanto, *Indonesia Raya Dibredel*, Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2016, hlm. 2.

⁵⁵ Zainal Abidin Achmad, *op.cit.*, hlm. 34.

diberikannya tekanan terhadap penggunaan bahasa Indonesia⁵⁶. Kebijakan ini secara tidak langsung mendorong peningkatan bahasa Indonesia serta mempercepat perkembangannya sebagai sarana komunikasi di berbagai bidang kehidupan dan dalam kehidupan masyarakat modern. Secara alami, penggunaan satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia turut memperkuat rasa kebersamaan serta solidaritas diantara berbagai kelompok etnis dan bahasa yang ada di Indonesia.

Pada masa pendudukan Jepang, terbit beberapa majalah dan surat kabar yang dapat mempengaruhi keadaan sosial di Indonesia. Misalnya surat kabar *Asia Raya*⁵⁷ yang terbit pada bulan April 1942, serta surat kabar berbahasa Cina pimpinan Oei Tiang Tjoei dengan nama *Kung Yung Pao* (Jakarta). Beberapa surat kabar tersebut banyak menyuarakan pergerakan. Oleh sebab itu, pemerintah Jepang mulai mengatur proses penerbitannya secara ketat⁵⁸.

Pers pada masa pendudukan Jepang sebagian besar mengambil nama yang khas dengan semangat juang bangsanya. Misalnya surat kabar *Asia Raya*, *Sinar Baroe*, *Sinar Matahari*, *Soeara Asia*, dan *Tjahaja*. Surat kabar yang paling terkemuka pada masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah *Asia Raya* yang terbit di Jakarta, walaupun ada surat kabar lainnya yaitu *Soeara Asia* yang mempunyai jumlah oplah lebih besar. *Asia Raya* berhenti terbit pada tahun 1945

⁵⁶ Sagimun Mulus Dumadi, *Peranan Pemuda dari Sumpah Pemuda sampai Proklamasi*, Jakarta: Bina Aksara, 1898, hlm. 213.

⁵⁷ Surat kabar berbahasa Indonesia pertama yang diberi izin terbit pada masa pendudukan Jepang. Dibiayai oleh perusahaan penerbitan Asahi di Osaka, terbit pada tahun 1942-1945 dan menjadi salah satu sumber pemberitaan bagi semua surat kabar di Jawa. Dijadikan sebagai alat utama propaganda yang dipimpin oleh R. Soekardjo Wirjopranoto, dan R. M. Winarno sebagai pemimpin redaksi. Surat kabar ini memiliki oplah 18.000 eksemplar. Lihat: Nino Oktorino, *op.cit.*, hlm. 9.

⁵⁸ Wahjudi Djaja, *op.cit.*, hlm. 48.

setelah Jepang menyerah pada sekutu, dan seluruh staf Indonesia mengundurkan diri dari *Asia Raya* sebagai bentuk aksi yang menentang adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Sementara itu, di daerah lainnya juga terbit surat kabar pimpinan Adinegoro yaitu *Kita Sumatra Shimbun* yang terbit di Medan. Daerah lainnya adalah Padang yang menerbitkan surat kabar *Padang Nippo*, surat kabar *Palembang Shimbun* yang terbit di Palembang, *Lampung Shimbun* terbit di Tanjung Karang, dan *Sinar Matahari* yang terbit di Ambon. Surat kabar tersebut pada awalnya mengakomodasi kepentingan pemerintah Jepang, namun seiring dengan perkembangannya berubah menjadi jalan dalam pergerakan nasional untuk bangsa Indonesia⁵⁹.

Selain surat kabar, terdapat pula lembaga-lembaga pers penting lainnya seperti kantor berita, salah satu diantaranya adalah Badan Pers Arab yang didirikan oleh warga Indonesia keturunan Arab. Kemudian, nama lembaga ini diubah menjadi Badan Pers Asia. Badan utama Pers Asia adalah menyuarakan perjuangan Republik Indonesia di kawasan Timur Tengah, sehingga berhasil menarik perhatian masyarakat Internasional. Para badan anggota pers ini sering mengalami tekanan dan gangguan dari pihak penguasa Belanda. Pengorbanan yang mereka lakukan akhirnya membuat Badan Pers Asia memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah Republik Indonesia.

Selanjutnya, Badan Pers Asia bergabung dengan kantor berita nasional yaitu Antara yang turut didirikan oleh Adam Malik pada tahun 1937. Kantor

⁵⁹ Wahjudi Djaja, *op.cit.*, hlm. 49.

berita Antara sempat mengalami penyensoran oleh Belanda, bahkan seluruh aktivitasnya dilarang oleh Jepang yang juga memenjarakan para stafnya di Nusakambangan. Namun setelah proklamasi kemerdekaan, Kantor Antara memainkan peran yang sangat penting. Awalnya beroperasi dari Jakarta, lalu berpindah ke Yogyakarta, kantor berita ini menjadi corong resmi pemerintah Indonesia.

Kebijakan pemerintah Jepang dalam mengatur kehidupan pers selama masa pendudukan memang membatasi fungsi pers sebagai sarana informasi bagi masyarakat luas. Namun, kondisi tersebut justru memberikan kontribusi penting terhadap perjuangan kemerdekaan dan perjuangan pers nasional setelah Indonesia merdeka. Salah satu dampak positifnya adalah pelarangan penggunaan bahasa Belanda yang mendorong penyebaran bahasa Indonesia secara merata ke seluruh wilayah Nusantara. Selain itu, masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan untuk belajar mengelola media massa, serta dipercaya untuk memegang berbagai jabatan penting dalam struktur pers, sesuatu yang sebelumnya sangat terbatas pada masa penjajahan Belanda.

Masa pendudukan Jepang turut mendorong transformasi sosial, baik dalam struktur horizontal (hubungan antara kelompok masyarakat) maupun vertikal (hubungan kekuasaan dan status sosial), serta membuka akses bagi penduduk pribumi untuk mengisi posisi-posisi strategis yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi kaum kolonial. Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sudah memiliki kesiapan dalam mengisi jabatan-jabatan penting

yang dibutuhkan untuk menyusun dan menjalankan pemerintahan negara yang merdeka.

Pemerintah militer Jepang yang menduduki Indonesia menerapkan kebijakan yang antara lain memanfaatkan para pemimpin bangsa untuk mendukung kepentingan mereka dalam perang Asia Timur Raya. Namun, situasi ini justru dimanfaatkan oleh para tokoh pers dan pergerakan nasional sebagai peluang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Berbeda dengan masa penjajahan Belanda, pada masa pendudukan Jepang banyak tokoh pergerakan dan kalangan pers yang memilih sikap kolaboratif. Sikap ini membuka ruang yang lebih luas bagi gerakan perjuangan kemerdekaan. Banyak tokoh pergerakan dan sastrawan memanfaatkan media seperti surat kabar dan majalah untuk menyampaikan pemikiran dan gagasan mereka.

Setelah Jepang mengalami kekalahan, berbagai fasilitas percetakan dan penerbitan surat kabar mulai dikuasai oleh bangsa Indonesia. Surat kabar *Berita Indonesia* menjadi yang pertama terbit pada masa awal Republik, tepatnya pada 6 September 1945. Pada periode tersebut, konflik antara Belanda dan Jepang masih berlangsung, sehingga banyak surat kabar memuat tulisan yang bersifat propaganda anti-Belanda. Karena keterbatasan biaya, sebagian besar surat kabar hanya terbit dengan tiga hingga empat halaman. Meski demikian, penerbitan tetap berjalan di berbagai daerah, seperti *Fadjar* di Jakarta, *Pelita Rakyat* di Surabaya, *Soeloeh Rakyat* di Semarang, serta *Padjajaran* dan *Persatoean* di Bandung.⁶⁰

⁶⁰ Mutiara Gita Cahyani, *Sejarah Perkembangan Pers dan Pemanfaatan Museum Pers Nasional sebagai Media Pembelajaran Sejarah Masa Pergerakan Nasional*, JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi, Vol. 3, No. 1, Juli 2023, hlm. 32.

Seiring waktu, perkembangan surat kabar mengalami naik turun. Pada tahun 1948, tercatat ada 124 surat kabar dengan total oplah mencapai 405.000 eksemplar. Namun, jumlah tersebut menurun pada tahun 1949 menjadi 81 surat kabar dengan oplah sekitar 283.000 eksemplar. Penurunan ini dipengaruhi oleh Agresi Militer Belanda II pada tahun 1948. Walaupun jumlah penerbitan menurun, peran pers justru semakin kuat dalam menumbuhkan semangat kebangsaan, memperkaya cara berdebat di ruang publik, serta mendorong sikap perjuangan. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan secara internasional pada tahun 1949, surat kabar *Indonesia Raya* mulai terbit di Jakarta.